

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR RESTU ARTHA ABADI
TAHUN 2024**



**Jl. Solo – Yogyakarta, Jatirejo, Karanganyar, Klaten Utara,
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
TELEPON: (0272) 326262**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

| Informasi Umum BPR | |
|--------------------|---|
| Nama BPR/BPRS | BPR Restu Artha Abadi |
| Alamat | Jl. Solo – Yogyakarta, Jatirejo, Kel Karanganom, Kec Klaten Utara, Kab Klaten, Provinsi Jawa Tengah |
| Nomor Telepon | (0272) 326262 |

Penjelasan Umum:

Saat ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan Teknologi Informasi serta perkembangan jenis produk dan jasa lembaga jasa keuangan. Selain itu pada tahun 2024, masih ada dampak tekanan di beberapa sektor usaha akibat dari ketidakpastian ekonomi serta adanya peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank, dimana telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Pada tahun 2024, kinerja BPR mengalami peningkatan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum sepenuhnya pulih. BPR Restu Artha Abadi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Restu Artha Abadi didukung oleh integritas serta proses intern yang melibatkan seluruh organ Bank, baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Restu Artha Abadi.

BPR Restu Artha Abadi senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Selain itu dalam penerapan Tata Kelola, kami selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Restu Artha Abadi terus berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

| | |
|--|----------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 2. Baik |
|--|----------------|

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| | | |
|---|-------------|------------------------|
| 1. | Nama | Maksur Istanto |
| Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: | | |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, anggaran dasar BPR serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;2. Merealisasikan pencapaian target/ sasaran kinerja keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana bisnis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi BPR;3. Melaksanakan tata kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya, dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antar bagian/ unit kerja yang menangani operasional, bisnis dan penunjang operasional lainnya;4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;5. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan dewan komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;6. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dalam rangka efektifitas pengawasan aktif sebagaimana ketentuan dalam manajemen risiko BPR;7. Menyampaikan kebijakan BPR yang bersifat strategis dalam bidang kepegawaian kepada seluruh SDM / pegawai BPR;8. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada dewan komisaris dan pemegang saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. | | |
| 2. | Nama | Tulus Sugiyanto |
| Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: | | |
| <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu tugas Direktur utama dalam memastikan proses bisnis Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan bisnis Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;4. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Bisnis Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank;5. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya;6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama; | | |

7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang bisnis kepada pegawai.

| | | |
|----|------|------------------------------|
| 3. | Nama | Wikan Pawitra Hapsari |
|----|------|------------------------------|

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Direktur Operasional memastikan kelancaran kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;
4. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan operasional BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang;
5. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama;
7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang operasional kepada pegawai.

| | | |
|----|------|--------------------------------|
| 4. | Nama | Mohammad Taufik Nugroho |
|----|------|--------------------------------|

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Direktur Kepatuhan, memastikan kegiatan Bank berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar BPR;
4. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
5. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang;
6. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;
7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis;
2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat;

3. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memadai yaitu : Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku, dan apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR;
4. Memperbaiki kualitas kredit dan memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan dan/atau NPL serta melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain : pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani bisnis, operasional, audit intern, manajemen risiko dan kepatuhan;
7. Menyediakan data dan informasi laporan yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| 1. | Nama | Novian Chandra Dewantara |
| | Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; 2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank; 5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya; 6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. | |
| 2. | Nama | Priyangga Wahyu Wibowo |
| | Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS; 2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi; 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen; 4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank 5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas | |

otoritas lainnya;

6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

3. Nama

Subandi

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;
2. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi;
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen;
4. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank
5. Meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya;
6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi:

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2024 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada, guna mendukung perkembangan usaha di masa mendatang sehingga penyaluran kredit tumbuh berkualitas, penyerapan DPK juga bertumbuh serta rasio tingkat kesehatan tetap terjaga sehat;
2. Diharapkan manajemen mengoptimalkan seluruh kantor cabang dan kantor kas yang ada sehingga semua sumber daya yang ada bisa berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja;
3. Fokus pada segmentasi target UMKM dan selalu berupaya untuk memperkuat positioning pasar;
4. Peningkatan kualitas tenaga pemasaran dengan pelatihan dan monitoring yang baik;
5. Penetasi pasar secara optimal sesuai dengan strategi pemasaran yang dibuat dan sesuai dengan potensi pasar di masing-masing wilayah kantor BPR;
6. Disiplin pada proses kredit, penanganan tunggakan dan manajemen NPL. Mapping debitur bermasalah dilakukan dengan ketat dan solusi penyelesaian jelas;
7. Optimalisasi teknologi pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja;

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang sudah dilakukan upaya rekrutmen pada bulan Desember 2024 dan akan terpenuhi pada awal semester 1 tahun 2025 agar terpenuhi komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang sudah dilakukan upaya rekrutmen pada bulan Desember 2024 dan akan terpenuhi pada awal semester 1 tahun 2025 agar terpenuhi komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nama | Maksur Istanto |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Tulus Sugiyanto |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Wikan Pawitra Hapsari |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 4. | Nama | Mohammad Taufik Nugroho |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Nama | Novian Chandra Dewantara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Priyangga Wahyu Wibowo |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Subandi |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak ada kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Nama | Santoso Soegiarto, IR |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT Yasaniaga Utama Mulia |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 50,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 50,00 |
| 2. | Nama | Ratnawati, SE |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT Yasaniaga Utama Mulia |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 50,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 50,00 |

Tidak ada kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Maksur Istanto |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Tulus Sugiyanto |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Wikan Pawitra Hapsari |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 4. | Nama | Mohammad Taufik Nugroho |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Novian Chandra Dewantara |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Priyangga Wahyu Wibowo |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Subandi |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | Tidak Ada Kepemilikan Saham |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Tidak ada kepemilikan saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Nama | Maksur Istanto |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Tulus Sugiyanto |
| | Hubungan Keuangan Dengan | Tidak ada |

| | | |
|--|--|-----------|
| | Anggota Direksi Lain di BPR | |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 3. | Nama | Wikan Pawitra Hapsari |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 4. | Nama | Mohammad Taufik Nugroho |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Nama | Novian Chandra Dewantara |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|------------------------|
| 2. | Nama | Priyangga Wahyu Wibowo |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-----------|
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | Subandi |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Nama | Maksur Istanto |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Tulus Sugiyanto |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 3. | Nama | Wikan Pawitra Hapsari |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 4. | Nama | Mohammad Taufik Nugroho |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Nama | Novian Chandra Dewantara |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Priyangga Wahyu Wibowo |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 3. | Nama | Subandi |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota | Tidak ada |

| | |
|---|-----------|
| Dewan Komisaris Lain di BPR | |
| Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | 4 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | Rp394.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | Rp289.206.485 |

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tantiem | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan | Rp0 |

Tantiem Komisaris (Rp)

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham **0 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) **Rp0**

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya **1 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) **Rp77.500.000**

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya **2 orang**

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) **Rp45.000.000**

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) **Rp0**

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) **0 orang**

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) **Rp0**

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) | Rp0 |

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 0 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp) | Rp0 |

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 6,89 : 1 |
|-------------|----------|

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 1,43 : 1 |
|-------------|----------|

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 1,05 : 1 |
|-------------|----------|

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 1,50 : 1 |
|-------------|----------|

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

| | |
|-------------|----------|
| Rasio (a/b) | 2,50 : 1 |
|-------------|----------|

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 1. | Tanggal Rapat | 09 Januari 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Tahun 2023, Pembahasan APU PPT dan Evaluasi Manajemen Resiko Semester II Tahun 2023 | | |
| 2. | Tanggal Rapat | 12 April 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Triwulan I 2024 | | |
| 3. | Tanggal Rapat | 15 Juli 2024 |
| | Jumlah Peserta | 2 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Kinerja dan Manajemen Risiko BPR Restu Artha Abadi Semester I Tahun 2024 | | |
| 4. | Tanggal Rapat | 06 November 2024 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: | | |

Evaluasi Kinerja BPR Restu Artha Abadi Triwulan III Tahun 2024, dan Pembahasan RBB 2025

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Nama Anggota Dewan Komisaris | NOVIAN CHANDRA DEWANTARA |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 4 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 2. | Nama Anggota Dewan Komisaris | PRIYANGGA WAHYU WIBOWO |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 4 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 3. | Nama Anggota Dewan Komisaris | SUBANDI |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 1 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

| | |
|--|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses | 0 kasus |

| | |
|--------------------------|--|
| Hukum Pada Tahun Laporan | |
|--------------------------|--|

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|---|----------------|

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|-----------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
|---|----------------|

| | |
|--|----------------|
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
|--|----------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses | 0 kasus |
|--------------------------------------|----------------|

Hukum Pada Tahun Laporan

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|---|----------------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

Tidak terjadi penyimpangan internal (Fraud) pada periode pelaporan

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

| | |
|---|----------------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 1 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

| | |
|---|----------------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |

Terdapat 1 (satu) permasalahan hukum pada periode pelaporan dan telah selesai serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berdampak pada kinerja BPR

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada periode pelaporan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Tanggal Pelaksanaan | 08 Januari 2024 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Panti Ad Dhuha |
| | Penjelasan Kegiatan | Pembagian sembako dan makan bersama anak-anak panti asuhan |
| | Jumlah (Rp) | Rp4.687.600 |

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi BPR Restu Artha Abadi untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Klaten, 30 April 2025

BPR Restu Artha Abadi



Novian Chandra Dewantara
Komisaris Utama



Maksur Istanto
Direktur Utama